

Penguatan Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP): Studi Pada Kabupaten Indramayu

Ika Agustina^a, Dimas Permana^b, Raisa Rafifiti Choerunnisa^c

^{a,b} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

^c Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ika_agustina@ipdn.ac.id , dimaspermana112131@gmail.com ,
raisa.rafifiti@poltek.stialanbandung.ac.id

Abstrak

Inspektorat Kabupaten memiliki peran strategis dalam pengawasan sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah yang memengaruhi opini audit BPK terhadap pemerintah daerah. Namun, pengawasan intern di Kabupaten Indramayu masih menghadapi sejumlah kelemahan sehingga opini WTP yang diperoleh disertai paragraf penekanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Indramayu, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berjalan sudah cukup baik, namun masih terdapat hambatan yang dialami oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam menjalankan pengawasan internal, dilihat dari lima dimensi teori pengawasan (T. Hani Handoko, 2014) dimana dimensi prosedur, ketelitian dan perbaikan sudah baik dan sesuai, namun dimensi standar dan pengukuran pekerjaan masih belum optimal. Untuk mengatasi hambatan, direkomendasikan upaya yang dapat ditempuh oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yaitu melalui strategi penguatan kelembagaan dan manajerial. Pertama, optimalisasi rekrutmen SDM berbasis analisis jabatan dan beban kerja. Kedua, peningkatan kualitas pengawasan berorientasi pada prinsip 3E (ekonomis, efektif, efisien). Ketiga, pengembangan sistem informasi pengawasan internal yang terintegrasi untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas dan efektivitas.

Kata Kunci: Pengawasan, Standar, Indramayu, Inspektorat, WTP.

Strengthening Regional Inspectorate Oversight in Maintaining the Unqualified Opinion (WTP): A Case Study of Indramayu Regency

Abstract

The Regency Inspectorate plays a strategic role in supervision as part of the government's internal control system, which influences the audit opinion of the Supreme Audit Board (BPK) on local governments. However, internal supervision in Indramayu Regency still faces several weaknesses, resulting in the Unqualified Opinion (WTP) being accompanied by an emphasis of matter paragraph. This study aims to examine the implementation of supervision by the Indramayu Inspectorate, the obstacles encountered, and the efforts that can be undertaken to address them. The research employs a descriptive qualitative approach. The findings indicate that the supervision carried out by the Indramayu Inspectorate in maintaining the Unqualified Opinion (WTP) has been relatively effective. Nevertheless, the Inspectorate of Indramayu Regency continues to experience obstacles in implementing internal supervision. Based on (T. Hani Handoko, 2014) five dimensions of supervision, three dimensions (procedures, accuracy, and corrective actions) are well implemented and appropriate, whereas the other two dimensions (standards and performance measurement) remain suboptimal. To overcome these obstacles, several recommendations are proposed to optimize the supervisory function of the Indramayu Regency Inspectorate through institutional and managerial strengthening

strategies. First, optimizing human resource recruitment based on job analysis and workload assessment. Second, enhancing the quality of supervision by adhering to the 3E principles (economical, effective, and efficient). Third, developing an integrated internal supervision information system to strengthen transparency, accountability, and effectiveness.

Keywords: *Supervision, Standards, Indramayu, Inspectorate.*

A. PENDAHULUAN

Pengawasan laporan keuangan memiliki peran vital dalam tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Proses ini menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, yang merupakan amanah dari masyarakat. Melalui pengawasan yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku, mencegah penyalahgunaan, dan korupsi. Pengawasan juga membantu mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah, memungkinkan perbaikan kebijakan dan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran. Lebih jauh, laporan keuangan yang akurat dan terpercaya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang bijak oleh para pemimpin daerah, serta menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan keuangan tidak hanya sebatas menjaga integritas sistem pemerintahan, tetapi juga membangun kepercayaan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Binawati & Badriyah, 2022).

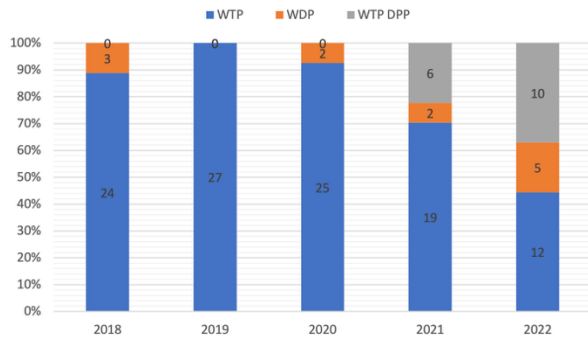
Inspektorat Daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Daerah. Inspektorat memiliki peran me-reviu laporan keuangan sebelum disajikan kepada BPK oleh kepala daerah. Inspektorat perlu me-reviu laporan keuangan agar laporan yang disajikan nantinya sudah sesuai dengan standar akuntansi

pemerintahan (Hidayah et al., 2019). Pengawasan Inspektorat Daerah sangat berpengaruh terhadap opini hasil audit yang dilakukan BPK terhadap Pemerintah Daerah. penelitian terdahulu (Iswanto & Rufaedah, 2019) yang menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah berperan sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah.

Hasil dari pemeriksaan BPK berupa opini audit yang terdiri dari empat jenis: 1.) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini terbaik dan menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 2.) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti laporan disajikan dengan beberapa pengecualian yang tidak mempengaruhi kewajaran secara keseluruhan; 3.) Tidak Wajar (TW) yang menunjukkan bahwa laporan tidak disajikan secara wajar dan terdapat kesalahan material yang signifikan; serta 4.) Tidak Memberikan Pendapat (TMP) di mana BPK tidak dapat memberikan opini karena keterbatasan informasi atau masalah lainnya. (L.I., 2020).

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan hanya sekedar predikat penghargaan yang diraih oleh suatu pemerintah daerah, namun sangat penting bagi pemerintah daerah seperti tingkat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah meningkat. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak termasuk investor yang menggunakan penilaian tersebut untuk melihat bagaimana kinerja dan stabilitas pada keuangan daerah (Riswanto, 2022).

Berikut penulis sajikan data terkait perkembangan opini pemeriksaan LKPD pada seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama 5 tahun terakhir:



Gambar 1. Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD di Kabupaten/Kota Jawa Barat

Sumber : Jabar.BPK.go.id (2024).

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa mayoritas dari kabupaten/kota di Jawa Barat sudah mendapatkan opini WTP, namun mengalami penurunan di 3 tahun terakhir, dimana beberapa kabupaten/kota mendapatkan opini WTP dengan paragraf penekanan suatu hal bahkan WDP. Kabupaten Indramayu sendiri termasuk dari beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan opini hasil pemeriksaan LKPD. Berikut penulis sajikan data perolehan opini atas hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Indramayu selama 5 tahun terakhir:

Tabel 1. Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Indramayu

	2019	2020	2021	2022	2023
OPINI BPK KAB. INDRAMAYU	WTP	WDP	WTP dengan paragraf hal lain	WTP dengan paragraf penekanan suatu hal	WTP dengan paragraf penekanan suatu hal

Sumber : Jabar.BPK.go.id (2024).

Berdasarkan Tabel 1 ditunjukkan bahwa Kabupaten Indramayu selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah baik karena mendapatkan opini wajar tanpa

pengecualian pada 4 tahun dari 5 tahun berakhir, walaupun di 3 tahun terakhir ini Kabupaten Indramayu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dengan beberapa catatan. Sepanjang tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk periode anggaran 2023.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan pada tahun 2023 di Kabupaten Indramayu antara lain :

- Potensi kegagalan investasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada BPR Karya Remaja Indramayu dan BPR Indramayu Jabar;
- Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap dari Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) belum tertib dan PSU atas 74 Perumahan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu; dan
- Pelaksanaan 23 Paket Pembangunan Jalan yang bersumber Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua Organisasi Perangkat Daerah tidak sesuai kontrak sebesar Rp2.948.690.976,39.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern masih memiliki beberapa kelemahan yang membuat Kabupaten Indramayu mendapatkan opini WTP dengan paragraf penekanan suatu hal. Ini merupakan suatu masalah yang harus diatasi oleh pemerintah Kabupaten Indramayu agar kedepannya dapat meningkatkan dan mempertahankan opini hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Inspektorat Kabupaten Indramayu memiliki peran krusial dalam mengawal dan

memastikan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Inspektorat bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berjalan efektif, tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan baik, dan risiko-risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat dikelola dengan tepat.

Inspektorat Indramayu masih tertinggal dalam menerapkan digitalisasi sistem pengawasan yang seharusnya sudah menjadi kebutuhan di era modern ini. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi digital untuk pengawasan berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan yang masih mengandalkan sistem manual. Hal ini menyebabkan proses audit memakan waktu lebih lama, meningkatkan risiko kesalahan manusia, serta menyulitkan proses dokumentasi dan pelacakan hasil audit.

Inspektorat Kabupaten Indramayu belum menggunakan digitalisasi, sedangkan beberapa daerah sudah memanfaatkan digitalisasi pengawasan, seperti Provinsi DIY yang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Intern (SIWASIN), Aplikasi Digitalisasi Pengelolaan Pelaksanaan Reviu (SIPELARI) pada Inspektorat Kota Bogor, Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIP) pada Inspektorat Kota Sukabumi. Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari Analis Inspektorat Indramayu menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu masih pada tahap merencanakan penggunaan digitalisasi dalam pengawasan yang direncanakan akan dapat digunakan pada awal tahun 2025 dengan nama Aplikasi Monitoring Pengawasan Laporan dan Tindak Lanjut (AmpelaAti).

Penelitian ini dilakukan mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum mampu mempertahankan opini WTP tanpa adanya penekanan paragraf suatu hal di dalamnya

serta Inspektorat Indramayu yang belum memanfaatkan digitalisasi dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

B. METODE

Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif karena dalam penelitian ini menggunakan data sebagai acuan yang berupa kata-kata serta gambar yang diperoleh dari dokumen dan wawancara. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan penelitian ini memerlukan eksplorasi atau mencari informasi secara mendalam dari partisipan yang memiliki pengalaman terhadap objek yang penulis teliti, serta penulis ingin memahami lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti (Kautsar & Choerunnisa, 2024). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dalam melakukan wawancara, peneliti memilih informan yang dirasa dapat memberi keterangan valid yang berkaitan dengan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Indramayu diambil berdasarkan prosedur *purposive sampling*. Dalam menentukan informan penelitian, peneliti melakukan seleksi yang cermat dan sistematis dengan mempertimbangkan berbagai aspek relevan seperti jabatan struktural, pengalaman kerja, keterlibatan langsung dalam proses pengawasan, serta pengetahuan komprehensif mengenai sistem dan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu. Pertimbangan tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks penelitian yang dilakukan. Informan dalam penelitian ini adalah Inspektur, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III, Jabatan Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Umum Pemerintah Daerah (P2UPD).

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pengawasan Inspektorat Daerah dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Kabupaten Indramayu telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu sesuai dengan regulasi yang ada. Penelitian ini dianalisis berdasar pada lima dimensi pengawasan menurut teori pengawasan (T. Hani Handoko, 2014) yaitu:

a. Prosedur

Prosedur pengawasan Inspektorat Indramayu dilakukan berdasar pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dokumen perencanaan ini menjadi pedoman sistematis bagi seluruh kegiatan pengawasan internal yang dilakukan sepanjang satu tahun anggaran, dengan tujuan utama mendorong efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan Inspektorat mengikuti dan berpedoman pada PKPT yang telah disusun secara komprehensif. Penyusunan PKPT ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek penting, termasuk kepatuhan terhadap kerangka regulasi yang berlaku serta hasil analisis risiko yang mendalam. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan adanya PKPT menjadikan pedoman prosedur dalam pengawasan selama satu tahun.

Mekanisme Pemantauan Berkala adalah suatu proses sistematis dan terencana yang

dilakukan secara rutin pada interval waktu tertentu untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mengevaluasi perkembangan suatu program, kegiatan, atau kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prosedur pengawasan dan mekanisme pemantauan berkala yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan dimensi prosedur pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh (T. Hani Handoko, 2014). Dalam aspek prosedur pengawasan yang tepat, Inspektorat Kabupaten Indramayu telah mengimplementasikan serangkaian prosedur yang terstruktur dan sistematis sebagaimana tercermin dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Sementara itu, dalam dimensi mekanisme pemantauan berkala, penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Indramayu telah menerapkan sistem pemantauan yang konsisten dan komprehensif.

b. Standar

Standar pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu mencakup beberapa aspek yang penting dalam pengawasan internal pemerintahan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kode etik dan standar audit yang ditetapkan, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan standar pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu tentu berpedoman pada regulasi terkait. Program kerja pengawasan tahunan digunakan sebagai standar pengawasan. Perjanjian kinerja yang digunakan sebagai target dan standar yang harus diperoleh oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Indramayu, terlihat bahwa

dokumen tersebut memuat standar-standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Standar tersebut tercermin melalui penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang secara langsung berkaitan dengan kualitas pengawasan internal. Dengan adanya indikator seperti Indeks Reformasi Birokrasi, Level Kapabilitas APIP, dan Persentase Perangkat Daerah Berkinerja Baik, Inspektorat memiliki tolok ukur yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengawasan agar selaras dengan tujuan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan standar pengawasan dan kriteria pengawasan yang jelas di Inspektorat Kabupaten Indramayu telah sejalan dengan dimensi standar dalam teori pengawasan (T. Hani Handoko, 2014), namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas fungsi pengawasan internal pemerintah daerah secara keseluruhan.

c. Ketelitian

Ketelitian dalam pengawasan merupakan aspek penting yang merujuk pada kecermatan, ketepatan, serta kehati-hatian dalam fungsi pengawasan. Ini mencakup kemampuan untuk memperhatikan detail-detail kecil, melakukan verifikasi data secara akurat, dan menjalankan prosedur pemeriksaan dengan benar dan menyeluruh. Penelaahan ulang bukti-bukti pengawasan merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu yaitu reviu. Reviu merupakan salah satu bagian pengawasan yang penting dimana bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan yang selanjutnya dilaporkan kepada pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Juanda & Nauli, 2018) yang menyatakan bahwa kualitas penelaahan ulang bukti-bukti pengawasan yang baik sejalan dengan kualitas hasil laporan keuangan pemerintah daerah, Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa penelaahan ulang bukti-bukti pengawasan ini sebenarnya sudah dilakukan dengan baik oleh Inspektorat Indramayu, namun hambatan yang diperoleh pada indikator ini yaitu masih adanya kurang koordinasi pada OPD juga sampel dokumen yang diperiksa dan dibina oleh Inspektorat berbeda dengan yang nantinya diperiksa oleh pengawas eksternal membuat indikator ini masih adanya hambatan,

Verifikasi data dan informasi terhadap penyimpangan merupakan sebuah proses yang sistematis untuk memeriksa, mengonfirmasi, dan memvalidasi kebenaran serta keakuratan data dan informasi yang berkaitan dengan indikasi penyimpangan yang telah teridentifikasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penyimpangan yang dilaporkan memiliki dasar faktual yang kuat sebelum dilakukan tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Indramayu telah melaksanakan pengawasan dan sesuai dengan indikator penelaahan ulang bukti pengawasan dan indikator verifikasi data terhadap penyimpangan secara baik, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan asas praduga tak bersalah. Hal ini sesuai dengan dimensi ketelitian pada teori pengawasan oleh (T. Hani Handoko, 2014), Walaupun didalamnya masih adanya hambatan seperti kurang koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

d. Pengukuran Pekerjaan

Dalam praktiknya di Inspektorat, pengukuran berbasis sasaran strategis ini menjadi fondasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi fungsi

pengawasan internal. Efektivitas pemantauan oleh inspektorat Indramayu sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah atau organisasi berjalan sesuai dengan peraturan, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau ketidaksesuaian dalam penggunaan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan didapatkan kesimpulan bahwa efektivitas pemantauan ini sudah dilakukan juga dibuat inovasi pemanfaatan teknologi yaitu aplikasi Ampela Ati (Aplikasi monitoring dan pemantauan tindak lanjut). Namun aplikasi ini juga masih tahap pengembangan lebih lanjut agar lebih maksimal.

Evaluasi menyeluruh dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi, dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya (Choerunnisa & Harahap, 2025). Standar dan sasaran yang jelas juga membantu dalam mengidentifikasi indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil (Kautsar & Choerunnisa, 2024). Berdasarkan keterangan hasil wawancara kepada narasumber menunjukkan bahwa indikator evaluasi pencapaian target telah dilaksanakan dengan baik di Inspektorat Indramayu dibuktikan dengan adanya hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah yang tercantum pada renja inspektorat setiap tahunnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Indramayu telah melaksanakan fungsi pengawasan dan sesuai dengan indikator efektivitas pemantauan dan indikator evaluasi pencapaian target pada dimensi pengukuran pekerjaan teori pengawasan oleh (T. Hani Handoko, 2014). Namun didalamnya masih terdapat hambatan seperti pemanfaatan teknologi dengan dibuatnya Aplikasi AmpelaAti oleh

Inspektorat indramayu namun masih terbatas penggunaannya dan belum sepenuhnya efektif.

e. Perbaikan

Perbaikan yang dimaksud dalam konteks ini adalah tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan atau penggunaan anggaran oleh perangkat daerah terkait.

Penelitian menunjukkan indikator rekomendasi tindakan korektif telah dilaksanakan, namun keberhasilannya bukan hanya pada Inspektorat sebagai pengawas internal, namun kepada seluruh perangkat daerah yang terkait agar bertindak kooperatif dalam menindaklanjuti rekomendasi tindakan korektif yang diberikan. Pemantauan merupakan jenis kontrol yang digunakan untuk memantau pelaksanaan suatu program. Dalam situasi ini, pengendalian dapat dilakukan secara internal atau eksternal (Faishal & Choerunnisa, 2024). Pemantauan implementasi perbaikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan sistem yang belum digunakan secara maksimal juga karena butuhnya peran aktif dari auditee guna menindaklanjuti hasil perbaikan.

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan rekomendasi tindakan korektif dan pemantauan implementasi perbaikan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan dimensi perbaikan pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh (T. Hani Handoko, 2014). Namun didalamnya masih adanya hambatan dalam dimensi perbaikan.

2. Faktor Penghambat Pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu

Pengawasan Inspektorat Daerah masih menghadapi hambatan yang perlu ditindaklanjuti kedepannya. Faktor penghambat ini didapat berdasarkan

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti di Inspektorat Kabupaten Indramayu. Berikut beberapa faktor penghambat dalam pengawasan Inspektorat Kabupaten Indramayu, antara lain:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengawasan dan penunjang pengawasan
- APIP sebagai mitra strategis dalam berperan memberikan konsultasi (*consulting*) bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum terlaksana dengan baik
- Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengawasan belum berjalan maksimal

3. Upaya yang Dapat Dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu dalam Meningkatkan Pengawasan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dengan melihat hambatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu, maka perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada, yaitu sebagai berikut:

- Mengoptimalkan proses rekrutmen SDM Pengawasan sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Mengoptimalkan kualitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian 3E (Ekonomis, Efektif dan Efisien);
- Membangun Sistem Informasi Pengawasan Internal yang terintegrasi.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis, fakta di lapangan, dan wawancara dengan informan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Indramayu dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah berjalan cukup baik. Namun, pelaksanaan pengawasan

internal masih menemui beberapa hambatan. Dari lima dimensi pengawasan, tiga dimensi—yaitu dimensi prosedur, ketelitian, dan perbaikan—telah dinilai baik dan sesuai. Sementara itu, dua dimensi lainnya, yaitu dimensi standar dan pengukuran pekerjaan, masih menghadapi kendala.

Faktor-faktor penghambat utama yang disimpulkan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Indramayu meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) fungsional pengawasan dan penunjang pengawasan. Selain itu, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai mitra strategis dalam memberikan konsultasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu belum terlaksana secara optimal. Hambatan lain juga ditemukan pada belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan.

Guna mengatasi hambatan dan mengoptimalkan fungsi pengawasan, upaya Inspektorat Indramayu harus difokuskan pada beberapa hal. Prioritas utama adalah mengoptimalkan proses rekrutmen SDM Pengawasan yang sesuai dengan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Selanjutnya, Inspektorat perlu meningkatkan kualitas pengawasan yang berorientasi pada pencapaian 3E (Ekonomis, Efektif, dan Efisien). Langkah penting lainnya adalah membangun Sistem Informasi Pengawasan Internal yang terintegrasi untuk mendukung seluruh proses pengawasan.

Mengenai rekomendasi, pengawasan yang sudah berjalan cukup baik perlu terus ditingkatkan oleh Inspektorat Indramayu agar dapat memberikan pengawasan yang lebih berkualitas. Inspektorat juga perlu segera mengatasi berbagai hambatan dalam pengawasan internal, sehingga kendala tersebut dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan untuk menghasilkan kualitas

pengawasan yang jauh lebih baik. Seluruh upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mengatasi hambatan ini harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu di masa mendatang.

REFERENSI

- Astuti, T. D., Ramdani, E. M., Gedeona, H. T., & Maulana, R. R. (2025). Policy Implementation of Rumah Dataku Development for Quality Family Village in Kiaracondong Sub-district, Bandung City, Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(3), 139–150. <https://doi.org/10.18196/jpk.v6i3.24308>
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i1.419>
- Choerunnisa, R.R., Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) di Pemerintah Kota Cimahi. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8 (6), 429–438. <http://dx.doi.org/10.30865/juriko.m.v8i6.3762>
- Choerunnisa, R.R., Rosinta, R. (2023). Kualitas Pelayanan Jemput Bola bagi Warga Disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26 (1), 73.
- Choerunnisa, R. R., & Harahap, W. W. (2025). Implementasi Program 3M (Masyarakat Melek Metrologi) dalam Rangka Pemasaran Sosial di Kota Bandung oleh Direktorat Metrologi. *Jurnal Sekretaris Dan Administrasi Bisnis*, 9(1), 24–33.
- Dawud, J., Ramdani, D. F., & Abubakar, R. R. T. (2021). Dinamika Penerapan Dimensi Akuntabilitas dalam Merespon PP No. 24 tahun 2018 Studi Komparasi di DPMPTSP Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 24–40.
- Faishal, M. R., & Choerunnisa, R. R. (2024). Optimalisasi Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Coblong Kota Bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 570–576.
- Gunarto, K. T., Taryono, O., Dwiputrianti, S., & Choerunnisa, R. R. (2023). Penguatan Implementasi Program Buy The Service Trans Metro Pasundan Koridor V dalam Upaya Mengurangi Kemacetan. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 7(1), 188–193.
- Handoko, T.H. (2014). Manajemen. In *Bpfe: Yogyakarta*. BPFE Yogyakarta.
- Hanizam, J.H., Sudrajat, A.S., Taryono, O., Novira, A. (2025). An Analysis of the Quality of Srikandi Utilization as a Digital Official Document Management System at Bappelitbangda of Cimahi City. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 4(2), 229–234. <https://doi.org/10.55850/simbol.v4i2.259>
- Harijanto, D., Salleh, N. S. N. M., Touati, H., Dharmanegara, I. B. A., & Tanjung, H. (2022). Human Resource Development Perspective in Analyzing the Strategic Environment: Case on Inspectorate Probolinggo Regency. *Innovation Business Management and Accounting Journal*, 1(3), 86–93. <https://doi.org/10.56070/ibmaj.v1i3.15>
- Hidayah, K., Wismono, F. H., Kusumaningrum, M., & Amarullah, R. (2019). The Role of Regional Inspectorate of Samarinda City In Maintaining Unqualified Opinion. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 221–236. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.538>
- Iswanto, F. N., & Rufaedah, Y. (2019). Peranan Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan SPIP untuk Meningkatkan Perolehan Opini Audit

- (Studi Kasus Pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1146–1159.
- Jamilathul Ummah, A., Nurliawati, N., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2024). Hambatan proses akselerasi penerbitan sertifikat rechts cadaster: program pendaftaran tanah sistematis lengkap di kabupaten bandung. *Creative Research Journal*, 10(01), 27-40.
<https://doi.org/10.34147/crj.v10i1.340>
- Juanda, A., & Nauli, P. (2018). Pengaruh Proses Reviu Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 23(1), 41–54.
- Kautsar, S., & Choerunnisa, R. R. (2024). Implementasi Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 8(1), 551–560.
- L.I. (2020). *Ragam Opini BPK*. BPK.Go.Id.
<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>
- Mursalim, S. W., & Anwar, S. (2024). Institutional model of science techno Park: Overview of government-owned Stp management in West Java. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 43. doi:10.26858/jiap.v14i1.57033
- Novira, A., Ramdani, D. F., Choerunnisa, R. R., & Anwar, S. (2024). Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Melalui Jurnalisme Warga untuk Pilkada Jujur, Adil, dan Demokratis. *Setia Mengabdikan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 66-75.
- Riswanto. (2022). *Manfaat Opini WTP Bagi Masyarakat dan Daerah*. Suara Pemred Kalbar.
<https://www.suarapemredkalbar.com/read/opini/27112022/manfaat-opini-wtp-bagi-masyarakat-dan-daerah>
- Ruhiyat, R.F., Pradesa, H.A., Novira, A., Wijayanti, R. (2025). Implementation of the Balanced Scorecard for Performance Evaluation at the West Java Provincial Plantation Service. *Jurnal Manajemen dan Perbankan (JUMPA)*, Vol. 12, No. 1, 14 – 27.
<https://doi.org/10.55963/jumpa.v12i1.729>
- Setiawan, B., Choerunnisa, R.R., Caswadi, C. (2022). Evaluasi pelayanan publik pada poli umum rsud kota bandung. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 6 (1), 102 -110.
- Sudrajat, A. S., & Hanifah Rahayu, R. (2025). Implementasi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN) di RSUD Kota Bandung. *Journal of Governance Innovation*, 7(1), 372–391.
<https://doi.org/10.36636/jogiv.v7i1.5256>
- Taryono, O., Mursalim, S.W., Anwar, S. (2021). Strategy for Handling Covid-19 in the Perspectives of Policy Implementation, Community Institutions and Community Participation in Cileunyi Sub-District. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 140 – 145.